

1. Perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan.

Memasuki Triwulan IV 2025, stabilitas ekonomi di Kalimantan Selatan menghadapi tantangan yang cukup dinamis dengan tren inflasi yang cenderung meningkat sesuai dengan pola musimannya. Berdasarkan data akhir tahun, inflasi year-on-year (y-on-y) bergerak naik dari kisaran 3,11% pada Oktober hingga menyentuh angka 3,66% di bulan Desember. Kenaikan ini utamanya didominasi oleh tingginya kontribusi harga emas perhiasan dan sektor jasa seperti pendidikan dan kesehatan, serta kelompok pengeluaran makanan, minuman, dan tembakau. Sehingga, apabila komoditas emas perhiasan dikecualikan dari perhitungan inflasi umum, maka inflasi yoy pada bulan Desember hanya sebesar 2,16%.

Harga barang kebutuhan pokok terjaga didukung berbagai program pengendalian harga yang dilakukan secara kolaboratif oleh anggota TPID. Mengenai harga barang kebutuhan pokok, Komoditas beras sedikit meningkat didorong tingginya permintaan pada festive event se-Kalimantan (peringatan 5 Rajab/ Haul Guru Sekumpul), ditengah preferensi masyarakat Banjar yang lebih banyak mengkonsumsi beras lokal. Namun, penyaluran Beras beras SPHP yang masif menjadi instrumen utama pemerintah dalam yang mampu meredam gejolak harga beras di pasar. Meskipun harga beras lokal masih relatif tinggi karena preferensi masyarakat Banjar, penyaluran SPHP yang masif serta berhasil menjaga daya beli masyarakat menengah ke bawah. Di sisi lain, komoditas hortikultura seperti bawang merah dan aneka cabai mengalami fluktuasi harga yang signifikan pada bulan November dan Desember akibat gangguan produksi dan distribusi dari sentra produksi di Jawa yang terhambat oleh cuaca ekstrem dan gelombang tinggi. Sebagai upaya menjaga stabilitas harga, sepanjang Desember 2025, telah dilakukan setidaknya 43 kali operasi pasar/gerakan pangan murah kolaborasi antar instansi anggota TPID di wilayah provinsi Kalimantan Selatan dengan fokus pada komoditas utama penyumbang inflasi seperti beras, daging dan telur ayam ras serta komoditas hortikultura.

Risiko inflasi ke depan masih dibayangi oleh faktor logistik dan cuaca ditengah prakiraan meningkatnya permintaan pada periode Ramadhan & Idul Fitri (RAFI). Sebagai wilayah yang masih bergantung pada pasokan luar pulau untuk beberapa komoditas strategis, gangguan pada jalur transportasi laut di awal November s/d Desember 2025 dan awal tahun 2026 berpotensi memicu gangguan distribusi dan kelangkaan stok. Selain itu, momentum keagamaan besar di Kalimantan Selatan pada awal tahun diprediksi akan meningkatkan tekanan permintaan, sehingga diperlukan sinergi yang lebih kuat dalam Gerakan Pangan Murah (GPM), dan pengawasan stok di gudang-gudang distributor, aktivasi beberapa KAD untuk komoditas pangan strategis serta strategi komunikasi bijak berbelanja selama periode RAFI.

2. Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah.

#### ◦ **Identifikasi Permasalahan Pengendalian Inflasi Kalimantan Selatan Oktober 2025**

Pada Oktober 2025, Provinsi Kalimantan Selatan mengalami inflasi sebesar 0,36% (mtm), lebih tinggi dibandingkan realisasi inflasi nasional sebesar 0,28% (mtm) dan lebih tinggi dibandingkan inflasi wilayah Kalimantan sebesar 0,19% (mtm). Realisasi inflasi tersebut juga lebih tinggi dibandingkan bulan sebelumnya yang tercatat mengalami inflasi sebesar 0,29%

(mtm). Dengan perkembangan tersebut, secara tahunan inflasi IHK Provinsi Kalimantan Selatan tercatat sebesar 3,11% (yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan inflasi bulan sebelumnya sebesar 2,91% (yoy).

Kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya menjadi kelompok dengan andil terbesar inflasi Provinsi Kalimantan Selatan. Peningkatan tekanan pada kelompok ini seiring dengan harga emas perhiasan yang mengalami kenaikan karena penurunan suku bunga *The Fed*.

Secara spasial, mayoritas kota IHK di Provinsi Kalimantan Selatan mengalami inflasi, kecuali Tanah Laut. Pada Oktober 2025, kota dengan inflasi tertinggi di Provinsi Kalimantan Selatan adalah Banjarmasin dengan realisasi inflasi sebesar 0,51% (mtm), diikuti oleh Hulu Sungai Tengah sebesar 0,50% (mtm), Tanjung sebesar 0,42% (mtm), dan Kotabaru sebesar 0,24% (mtm). Di sisi lain, Tanah Laut mencatatkan deflasi sebesar 0,19% (mtm).

#### ◦ **Identifikasi Permasalahan Pengendalian Inflasi Inflasi Kalimantan Selatan November 2025**

Pada November 2025, Provinsi Kalimantan Selatan mengalami inflasi sebesar 0,73% (mtm), lebih tinggi dibandingkan realisasi inflasi nasional sebesar 0,17% (mtm) dan lebih tinggi dibandingkan inflasi wilayah Kalimantan sebesar 0,39% (mtm). Realisasi inflasi tersebut juga lebih tinggi dibandingkan bulan sebelumnya yang tercatat mengalami inflasi sebesar 0,36% (mtm). Dengan perkembangan tersebut, secara tahunan inflasi IHK Provinsi Kalimantan Selatan tercatat sebesar 3,35% (yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan inflasi bulan sebelumnya sebesar 3,11% (yoy).

Kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya masih menjadi kelompok dengan andil terbesar inflasi Provinsi Kalimantan Selatan. Tekanan harga pada kelompok ini didorong oleh komoditas emas perhiasan sejalan dengan kenaikan harga emas global seiring kembali meningkatnya ekspektasi penurunan suku bunga *the Fed* pasca rilis data ekonomi US ditengah investor global menjadikan komoditas ini sebagai aset *safe haven*.

Secara spasial, mayoritas kota IHK di Provinsi Kalimantan Selatan mengalami inflasi, kecuali Kotabaru. Pada November 2025, kota dengan inflasi tertinggi di Provinsi Kalimantan Selatan adalah Tanah Laut dengan realisasi inflasi sebesar 1,27% (mtm), diikuti oleh Hulu Sungai Tengah sebesar 0,72% (mtm), Banjarmasin sebesar 0,67% (mtm), dan Tanjung sebesar 0,37% (mtm). Di sisi lain, Kotabaru mencatatkan deflasi sebesar 0,06% (mtm).

#### ◦ **Identifikasi Permasalahan Pengendalian Inflasi Inflasi Kalimantan Selatan Desember 2025**

Pada Desember 2025, Provinsi Kalimantan Selatan mengalami inflasi sebesar 0,76% (mtm), lebih tinggi dibandingkan realisasi inflasi nasional sebesar 0,64% (mtm) dan lebih tinggi dibandingkan inflasi wilayah Kalimantan sebesar 0,65% (mtm). Realisasi inflasi tersebut juga lebih tinggi dibandingkan bulan sebelumnya yang tercatat mengalami inflasi sebesar 0,73% (mtm). Dengan perkembangan tersebut, secara tahunan inflasi IHK Provinsi Kalimantan Selatan tercatat sebesar 3,66% (yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan inflasi bulan sebelumnya sebesar 3,35% (yoy).

Kelompok makanan, minuman, dan tembakau menjadi kelompok dengan andil terbesar inflasi Provinsi Kalimantan Selatan. Tekanan harga pada kelompok ini sejalan dengan bencana hidrometeorologi di sentra produksi serta tingginya permintaan komoditas pangan ditengah pelaksanaan *festive event* Haul Guru Sekumpul yang diperkirakan dihadiri 4,9 juta jamaah. Harga komoditas bawang merah dan cabai rawit meningkat akibat gangguan produksi terdampak cuaca buruk di sentra produksi. Berkurangnya persediaan gabah di petani penghasil yang diakibatkan bencana banjir di sentra produksi juga menyebabkan meningkatnya harga beras lokal. Harga komoditas ikan gabus juga mengalami peningkatan seiring penurunan hasil tangkap di tengah curah hujan tinggi.

Selain itu momen Hari Besar Keagamaan yakni hari Natal dan Tahun Baru serta pelaksanaan momen 5 Rajab di Kalimantan Selatan yang bertepatan dengan libur sekolah membuat banyaknya pengunjung dari luar daerah ke Kalimantan Selatan umumnya menyebabkan tingginya permintaan terhadap beras lokal, daging ayam ras, telur ayam ras, kue basah, bawang merah, cabai rawit dan ikan gabus.

Secara spasial, seluruh kota IHK di Provinsi Kalimantan Selatan mengalami inflasi. Pada Desember 2025, kota dengan inflasi tertinggi di Provinsi Kalimantan Selatan adalah Hulu Sungai Tengah dengan realisasi inflasi sebesar 1,24% (mtm), diikuti oleh Tanah Laut sebesar 0,76% (mtm), Banjarmasin sebesar 0,71% (mtm), Tanjung sebesar 0,71% (mtm), dan Kotabaru sebesar 0,52% (mtm).

### 3. Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Kegiatan pengendalian inflasi daerah di Kalimantan Selatan yang dilakukan pada Oktober tetap berfokus pada penguatan sinergi seluruh *stakeholder* dan TPID se Kalimantan Selatan dalam rangka upaya pengendalian inflasi. Dalam rangka pengendalian inflasi secara berkelanjutan terutama menjelang HBKN dan Nataru, momen 5 Rajab (Haul Guru Sekumpul), TPID se-Kalimantan Selatan berupaya untuk menjamin stabilitas harga dan kecukupan pasokan pangan bagi masyarakat melalui berbagai kegiatan sebagai berikut:

Periode Oktober 2025

#### ◦ Upaya Keterjangkauan Harga

1. Pemerintah Provinsi Kalsel melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (PKP) mengadakan GPM secara serentak di seluruh kabupaten/kota se-Kalsel. Selain beras, fokus juga diberikan pada bawang merah, telur ayam, dan gula pasir karena adanya potensi kenaikan harga akibat faktor cuaca (gelombang laut) yang menghambat distribusi. Kegiatan ini bekerja sama dengan Badan Pangan Nasional, Bulog, distributor, serta pelaku usaha pangan lokal (16/10/2025)
2. Gerakan Pangan Murah hasil kerjasama antara Polda Kalsel, Bulog Kalsel dan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Prov. Kalsel di car free day Banjarmasin (5/10/2025).
3. Sidak Gubernur Kalimantan Selatan, Muhidin, bersama Kapolda Kalsel, Irjen Pol Rosyanto Yudha Hermawan ke Gudang Bulog Landasan Ulin Utara, Kecamatan Liang Anggang (6/10/2025).
4. Gerakan Pangan Murah (GPM) oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Selatan selama 2 hari di halaman TTIC DPKP Kalsel di Banjarbaru (3-4/10/2024).
5. Gerakan Pangan Murah (GPM) bersubsidi, di halaman kantor Kecamatan Amuntai Utara,

Kamis (16/10/2025).

6. Pasar Murah di 5 Kelurahan - Kota Banjarmasin (15 - 18/10/2025)
7. Monitoring Harga Beras Bersama SATGAS Pengendalian Harga Beras Prov. Kalsel di Pasar Keramat Barabai (22/10/2025).
8. Sidak Pasar di Pasar Wangkang Marabahan (02/10/2025).
9. Sidak Pasar di Tanah Laut (03/10/2025)
10. Pemantauan harga bapokting secara berkala melalui Dinas Perdagangan Provinsi Kalimantan Selatan.
  - **Upaya Kelancaran Distribusi**
    1. Dinas Perdagangan Provinsi Kalimantan Selatan bersama para pedagang dalam mendatangkan pasokan dari luar daerah, khususnya dari Nusa Tenggara Barat sebagai salah satu sentra produksi bawang merah nasional. Setelah sempat menembus angka Rp60.000 per kilogram pada bulan September 2025, harga bawang merah di Kalimantan Selatan kembali stabil di kisaran Rp40.000 pada bulan Oktober 2025. Penurunan harga ini merupakan hasil nyata dari langkah cepat mengatasi peningkatan harga komoditas.
    2. Pemantauan secara berkala terhadap distribusi berbagai kebutuhan pokok antara lain minyak goreng (Minyakita), LPG 3kg, telur ayam dan gula pasir oleh Dinas perdagangan Provinsi Kalimantan Selatan.
  - **Upaya Ketersediaan Pasokan**
    1. Penanaman Jagung Serentak Kuartal IV Tahun 2025 yang dilaksanakan di Jl. A. Yani Km. 17, masuk ke Jalan Gubernur Syarkawi Km. 5, Desa Padang Panjang, Kecamatan Sei Tabuk, Kabupaten Banjar. Kegiatan ini merupakan bagian dari gerakan nasional penanaman jagung serentak yang dilaksanakan di seluruh Indonesia dan dipantau langsung oleh pemerintah pusat melalui Presiden maupun Wakil Presiden dalam rangka swasembada pangan (8/10/2025).
    2. Fasilitasi rencana kerjasama KAD antara Kabupaten Tanah Laut dengan pihak kabupaten Probolinggo berkenaan dengan penyediaan komoditas bawang merah, dengan biaya angkut di bantu pihak Bank Indonesia Kantor Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan.
    3. Fasilitasi Penandatanganan Kerjasama Antar Daerah (KAD) antara Pemerintah Kota Banjarmasin dengan Kabupaten Enrekang (komoditas bawang merah dan cabai merah) dan Kabupaten Sidenreng Rappang (komoditas beras dan telur ayam ras) pada tanggal 22 Oktober 2025.
    4. Penyaluran CPP Beras BULOG Kalsel Periode Oktober 2025 sebesar 1.369.640 Kg di Kalimantan Selatan.
  - **Upaya Komunikasi Efektif**
    1. Sebagai tindaklanjut dari penyelenggaraan Regional Event GNPIP dan Rapat koordinasi TPIP-TPID Wilayah Kalimantan 2025, TPID Kalimantan Selatan melaksanakan *High Level Meeting* (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Kalimantan Selatan pada tanggal 15 Oktober 2025. Forum ini menjadi momentum strategis untuk memperkuat koordinasi pengendalian inflasi menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025, serta momen 5 Rajab. Selain itu juga sebagai upaya antisipatif terhadap pelaksanaan program MBG seiring bertambahnya Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah Kalimantan Selatan (15/10/2025).
    2. Menghadiri Rakor Pusat - Daerah dalam rangka tindak lanjut pengendalian inflasi oleh Ditjen Bina Bangda Kemendagri di Malang (17/10/2025).
    3. HLM TPID Kota Banjarmasin (22 Oktober 2025) yang dilaksanakan untuk menetapkan langkah-langkah struktural menjaga pasokan komoditas pangan yang dilakukan bersamaan dengan penandatanganan KAD dengan Kab. Enrekang dan Kab Sidrap.
    4. Pelaksanaan para Penyuluh Swadaya yang berasal dari petani di 13 Kab/Kota Provinsi

Kalimantan Selatan, oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Prov. Kalimantan Selatan sebagai upaya antisipatif terhadap kondisi iklim terkini, prediksi bulanan dan musim, serta rekomendasi rencana tanam pada tahun 2025/2026, sebagai bagian dari upaya untuk peningkatan produksi pertanian khususnya beras lokas agar tidak mengalami hambatan yang berdampak pada inflasi di daerah (17/10/2025).

5. High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Banjarbaru Tahun 2025 di Banjarbaru dalam rangka menetapkan langkah antisipatif menjelang peningkatan permintaan pada momen HBKN dan Nataru 2025 serta momen 5 Rajab (24/10/2025)

#### Periode November 2025

Dalam rangka pengendalian inflasi di daerah pada bulan November 2025, berbagai kegiatan pengendalian inflasi dilakukan secara masif sebagai upaya *frontloading* upaya pengendalian harga, dan menjaga stabilitas harga bagi masyarakat.

##### ◦ **Upaya Keterjangkauan Harga**

1. Operasi pasar menjelang Nataru oleh Dinas Perdagangan Provinsi Kalimantan Selatan di Kabupaten Hulu Sungai Utara, Barito Kuala, Banjarmasin, Kotabaru, Tanah Bumbu, Banjarbaru, Tanah Bumbu, Hulu Sungai Tengah, Tapin, Hulu Sungai Selatan, dan Tanah Laut (4 - 28/11/2025)
2. Pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM) oleh DPKP Provinsi Kalimantan Selatan untuk komoditas kebutuhan pokok dengan harga di bawah harga pasar, termasuk telur ayam ras, daging ayam ras, bawang merah, bawang putih, minyak goreng, gula, dan berbagai jenis sayur mayur di Kios Pangan Banjarbaru (20/11/2025).
3. Gerakan Pangan Murah (GPM) oleh DPKP Provinsi Kalimantan Selatan untuk komoditas kebutuhan pokok dengan harga di bawah harga pasar, termasuk telur ayam ras, daging ayam ras, bawang merah, bawang putih, minyak goreng, gula, dan berbagai jenis sayur mayur di Guntung Payung Banjarbaru (27/11/2025).
4. Penyaluran Bantuan Pangan (PBP) dari Pemerintah Pusat untuk alokasi Oktober dan November 2025 di Kabupaten Banjar (24/11/2025).
5. Gerakan Pangan Murah (GPM) Kota Banjarmasin di Siring Menara Pandang (29/11/2025)
6. Pasar murah Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Perdagangan di Mahligai Pancasila, Banjarmasin. Langkah ini diambil sebagai upaya konkret menekan inflasi dan membantu daya beli masyarakat menjelang akhir tahun (29/11/2025).

##### ◦ **Upaya Kelancaran Distribusi**

1. Pemantauan distribusi minyak goreng (Minyakita), LPG 3kg, telur ayam dan gula pasir secara berkala selama November 2025 oleh Dinas perdagangan Provinsi Kalimantan Selatan menjelang HBKN dan Nataru.
2. Sidak Satuan Tugas (Satgas) Pangan Ditreskrimsus Polda Kalimantan Selatan di Banjarmasin khusus minyak goreng Minyakita di sejumlah pusat perbelanjaan (20/11/2025).
3. Prioritisasi angkutan bahan pangan dan barang penting di pelabuhan/terminal/pasar untuk bongkar bongkar muat koordinasi Dishub, BUMN, TNI/POLRI.
4. Subsidi ongkos angkut untuk kegiatan pasar murah di Tabalong (8/11/2025)

##### ◦ **Upaya Ketersediaan Pasokan**

1. Penyaluran CPP SPHP Beras BULOG Kalsel Periode November 2025 sebesar 1.231.965 Kg di Kalimantan Selatan.

Workshop petani milenial bertujuan memperkuat peran generasi muda dalam

2. pembangunan sektor pertanian daerah di Kab. Banjar (5/11/2025).
3. Penyaluran Program Bantuan Pangan Pemerintah oleh BULOG Kalsel sebanyak 238.600 kilogram beras dan 47.720 liter minyak goreng kepada 11.930 KPM di Tanah Laut untuk Alokasi Oktober - November (25/11/2025)
  - **Upaya Komunikasi Efektif**
    1. Fasilitasi Pelaksanaan studi komparatif TPID Provinsi dan Kab/Kota IHK se Sulawesi Utara ke TPID Provinsi Kalsel dan TPID Kota Banjarmasin di Banjarmasin (11/11/2025).
    2. TPID Provinsi Kalimantan Selatan melaksanakan *Capacity Building* dan Studi Tiru untuk komoditas bawang merah di Brebes (19-20/11/2025).
    3. *High Level Meeting* (HLM) dan *Capacity Building* TPID Kab. Hulu Sungai Tengah (26/11/2025) guna menjaga stabilitas harga ditengah meningkatnya permintaan dari program MBG serta antisipasi meningkatnya permintaan pada momen HBKN, Nataru 2025.

#### Periode Desember 2025

Pada periode HBKN - Nataru, serta pelaksanaan momen 5 Rajab (Haul Guru Sekumpul), TPID se-Kalimantan Selatan berkomitmen untuk menjamin stabilitas harga dan kecukupan pasokan pangan, serta kelancaran distribusi di berbagai daerah. Selain itu juga dikarenakan intensitas hujan yang tinggi akibat cuaca ekstrem, terjadi bencana banjir di beberapa daerah di Kalimantan Selatan. Untuk itu dalam upaya memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat, telah dilakukan kegiatan sebagai berikut :

- **Upaya Keterjangkauan Harga**
  1. Dalam rangka menekan inflasi dan penguatan ekonomi terutama jelang Natal dan Tahun Baru (Nataru) Tahun 2025, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, melalui Dinas Koperasi dan UMKM menggelar Pasar Rakyat untuk UMKM di halaman Kantor Camat Banjarmasin Timur (1/12/2025).
  2. Operasi pasar menjelang Nataru oleh Dinas Perdagangan Provinsi Kalimantan Selatan di Kabupaten Tabalong dan Banjar (2-4/12/2025).
  3. Pasar Murah oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Banjarmasin di 9 (sembilan) Kelurahan Kota Banjarmasin (6 - 11/12/2025).
  4. Melaksanakan Operasi Pasar Murah dalam Rangka Pengendalian Inflasi Daerah dan Jelang Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 serta Momen 5 Rajab 1447 H. Kec. Paringin Kab. Balangan (23/12/2025).
  5. Kegiatan Pasar murah bersubsidi kerjasama Bulog dengan Asosiasi Pasar Murah di Trikora Banjarbaru (11/12/2025).
- **Upaya Ketersediaan Pasokan**
  1. Sidak Pasar menjelang Natal dan Tahun Baru serta Haul Guru Sekumpul pada bulan desember 2025 di Kota Banjarmasin (1/12/2025)
  2. Penandatanganan Kerjasama Antar Daerah (KAD) Kota Banjarmasin dengan Kab. Blitar untuk komoditas telur ayam ras (22/12/2025).
  3. Penyaluran/pemberian Bantuan Pangan bagi masyarakat terdampak bencana banjir di kabupaten Banjar dan Balangan guna memastikan ketersediaan pangan di masyarakat (30/12/2025).
  4. Penyaluran CPP SPHP Beras BULOG Kalsel Periode Desember 2025 sebesar 1.332.065 Kg di Kalimantan Selatan.
- **Upaya Kelancaran Distribusi**

Prioritas angkutan di pelabuhan/terminal untuk komoditas bahan pokok dan barang



1. penting agar distribusi dan bongkar muat dapat cepat disalurkan ke pasar.
2. Pengawasan pelabuhan bongkar muat oleh Dishub Prov Kalsel difokuskan pada peningkatan keselamatan dan kelancaran logistik menjelang Nataru dan momen 5 Rajab. Kebijakan ini mencakup monitoring rutin fasilitas dan alat keselamatan di pelabuhan penyeberangan (Banjar Raya, Alalak Jelapat, Tanjung Serdang) (26-30 Desember 2025).
3. Peningkatan pengawasan jalur distribusi di berbagai titik oleh Satgas Pangan Polda Kalsel untuk memastikan pengiriman pasokan bahan pangan berjalan lancar selama pelaksanaan kegiatan Haul Guru Sekumpul dan HBKN Nataru pada bulan Desember 2025.
4. Penyediaan Transportasi Darat dan Sungai Gratis oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan Pengelola Bandara Syamsuddin Noor bagi jemaah untuk acara Momen 5 Rajab (Haul Guru Sekumpul) (25 - 28 Desember 2025).
5. Pemantauan distribusi bapokting secara berkala pada bulan Desember 2025 oleh Dinas perdagangan Provinsi Kalimantan Selatan menjelang HBKN dan Nataru.
  - **Upaya Komunikasi Efektif**
  - 1. Rapat Koordinasi Pusat dan Daerah (Rakorpusda) Pengendalian Inflasi 2025 di Hotel Mulia, Jakarta, untuk mengevaluasi strategi menjaga stabilitas harga danantisipasi Natal-Tahun Baru (3/12/2025).
  - 2. High Level Meeting (HLM) Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Kabupaten HSS, yang dilaksanakan di Gedung Pramuka HSS pada Selasa, 9 Desember 2025.
  - 3. *Capacity Building* TPID Kab. Tanah Bumbu pada 10 Desember 2025
  - 4. High Level Meeting (HLM) TPID Kab. Tanah Laut pada 18 Desember 2025 untuk menetapkan strategi menjaga stabilitas harga di akhir tahun 2025 serta menetapkan langkah pengendalian inflasi di tahun 2026.
  - 5. HLM dan Capacity Building TPID Banjarmasin pada tanggal 22 Desember 2025 untuk penetapan respon cepat pengendalian harga bahan pangan pokok.
  - 6. High Level Meeting (HLM) Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Tapin 24 Desember 2025, di Aula TAMASA Kantor Bupati Tapin.
4. Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di Kalimantan Selatan pada Triwulan IV 2025 menunjukkan performa yang responsif melalui sinergi intensif dalam kerangka strategi 4K (Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif), di mana pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM) secara serentak dan penyaluran beras SPHP yang konsisten menjadi instrumen krusial dalam meredam gejolak harga di tengah meningkatnya permintaan akhir tahun. Meskipun intervensi pasar berhasil menjaga daya beli masyarakat, evaluasi mencatat bahwa tantangan struktural berupa ketergantungan tinggi terhadap pasokan pangan luar pulau masih titik krusial yang perlu dicarikan solusi strategisnya, terutama ketika cuaca ekstrem di perairan Jawa-Kalimantan menghambat distribusi logistik pada bulan November dan Desember yang memicu kenaikan harga komoditas *volatile foods* seperti bawang merah dan telur ayam. Oleh karena itu, guna mendukung ketersediaan pasokan antar waktu, antar wilayah, maka diperlukan penguatan infrastruktur pascapanen seperti *cold storage*, perluasan dan optimalisasi Kerjasama Antar Daerah (KAD) guna memitigasi risiko gangguan rantai pasok yang berulang, sehingga inflasi yang sempat menyentuh angka 3,66% di akhir tahun 2025 dapat dikembalikan ke dalam sasaran target nasional pada periode berikutnya. Lebih lanjut, terdapat faktor sosio-kultural

masyarakat Kalimantan Selatan yang mengakibatkan inflasi di tahun 2025 sedikit diatas sasaran. Sebagian besar masyarakat Kalimantan Selatan, memiliki preferensi menyimpan kekayaan pada komoditas emas, sehingga di momen harga emas yang tinggi maka permintaan juga relatif semakin meningkat. Kedepan perlu dipetakan upaya strategis pengendalian permintaan terhadap komoditas emas terutama kampanye mengenai bijak berinvestasi.

Catatan :

1. Pelaksanaan berbagai kegiatan operasi pasar/pasar murah/Gerakan pangan murah dapat dilakukan melalui kolaborasi yang baik antara pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota dengan instansi vertikal seperti Bank Indonesia, Polresta, Kodim, BULOG, KADIN serta berbagai stakeholder lainnya.
2. Pada triwulan 4 (empat) 2025, berkurangnya stok gabah/beras di daerah-daerah penghasil beras menjadi pendorong naiknya harga komoditas beras pada Desember 2025. Oleh karena itu untuk mengurangi ketergantungan terhadap beras lokal, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan giat mengkomunikasikan kepada masyarakat untuk menggunakan beras SPHP, termasuk ASN.
3. Melaksanakan pengawasan rutin terhadap komoditas Minyakita dan LPG 3 Kg agar sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan.
4. Penyaluran bantuan pangan pemerintah melalui Bulog kepada masyarakat, dapat tercapai dengan baik sesuai daftar penerima yang telah terverifikasi di masing - masing Kabupaten/Kota.
5. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan telah mendorong dan memfasilitasi pelaksanaan Kerjasama Antar Daerah (KAD) bagi Kabupaten/Kota yang mengalami gejala inflasi bahan pangan. Diantaranya KAD Pemko Banjarmasin dengan Kab. Sidrap, Kab. Enrekang, dan Kab. Blitar. Kerjasama tersebut dapat berjalan dengan optimal untuk menurunkan harga bahan pokok di daerah, sehingga dampak kenaikan harga dapat ditekan, stok tersedia dan terjaganya daya beli masyarakat.
6. Pemetaan daerah produksi untuk komoditas strategis baik di dalam dan diluar provinsi harus dilaksanakan agar memudahkan pelaksanaan KAD jika terjadi kelangkaan/inflasi bahan pangan.
7. Hasil dari pelaksanaan Capacity Building dan Studi Tiru TPID Kalimantan Selatan di Kab. Brebes, Tegal, Kediri dan Blitar dapat menambah pengetahuan anggota TPID dalam pengembangan komoditas pangan serta penyediaan stok pangan bagi daerah. Selain itu juga sekaligus sebagai peninjauan Kerjasama Antar Daerah (KAD) dengan daerah penghasil.
8. Terhadap penyaluran CPP Beras di Kalimantan Selatan bulan Januari - Desember 2025 telah tersalurkan sebanyak 10.622.740 KG. Sedangkan Penyaluran Bantuan Pangan Beras dan Minyak Goreng alokasi bulan November - Desember 2025 sebesar 3.266.520 KG Beras dan 653.304 KG Minyak Goreng.

5. Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Dalam rangka meningkatkan kinerja TPID Provinsi Kalimantan Selatan dalam menjaga stabilitas harga, maka direkomendasikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Meningkatkan koordinasi dan sinergi antar anggota TPID Provinsi Kalimantan Selatan, maupun dengan TPID Kabupaten/Kota se Kalimantan Selatan. Hal ini diperlukan untuk

memperkuat respons dan penanganan terhadap berbagai permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan berbagai program pengendalian inflasi di daerah.

2. Pelaksanaan Stabilitas Harga dan Intervensi Pasar melalui operasi pasar/pasar murah/Gerakan Pangan Murah harus terus dilaksanakan terutama pada saat inflasi pangan mengalami gejolak. Namun demikian komoditas yang dijual pada kegiatan operasi pasar/pasar murah tersebut berkaitan dengan komoditas pangan yang menyumbang inflasi di daerah sehingga dapat menstabilkan harga pasar. Selain itu, kegiatan stabilisasi pasar perlu diarahkan secara "tepat waktu, tepat sasaran, tepat lokasi" berkolaborasi dengan BUMN/BUMD pangan sehingga optimal menjaga stabilitas harga.
3. Penyaluran Bantuan Pangan bagi masyarakat yang terdampak banjir di wilayah Kalimantan Selatan dapat terus dilaksanakan sampai dengan kondisi mulai normal kembali. Hal ini sebagai upaya dukungan bagi masyarakat yang belum dapat melakukan aktivitas ekonomi.
4. Pendataan fasilitas/sarana pra sarana umum yang rusak akibat bencana banjir yang berpotensi menghambat jalur distribusi barang dan orang, sehingga dapat diperbaiki dan dipergunakan kembali.
5. Perlunya memperluas jangkauan Gerakan Pangan Murah (GPM) hingga ke tingkat kelurahan dan pemukiman padat penduduk, tidak hanya terpusat di kantor pemerintahan atau pasar induk.
6. Optimalisasi Penyaluran Beras SPHP agar menjamin keberlanjutan pasokan Beras SPHP di pasar tradisional dan ritel modern untuk meredam kenaikan harga beras lokal yang biasanya mengalami tren naik di akhir tahun sebagai akibat dari menipisnya stok gabah ditingkat petani dan produsen.
7. Perlunya percepatan realisasi Kerjasama Antar Daerah (KAD) dengan daerah produsen/penghasil oleh seluruh TPID Kabupaten/Kota dalam rangka pengamanan pasokan di daerah utamanya untuk komoditas bawang merah, aneka cabai, telur ayam ras dan produk hortikultura lainnya. Terlebih dengan semakin bertambahnya operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk pelaksanaan Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kalimantan Selatan maka juga meningkatkan permintaan terhadap bahan pangan pokok. Adapun skema kerjasama bisa dalam bentuk Business to Business (B2B) antar BUMD atau distributor.
8. Mendorong pengadaan *cold storage* (gudang pendingin) maupun atmosfer storage melalui BMUD Pangan ataupun dinas terkait untuk menyimpan stok cabai, bawang dan sayuran serta daging sebagai cadangan pasokan saat terjadi kelangkaan di pasar.
9. Melaksanakan monitoring dan pengawasan secara berkelanjutan terhadap perkembangan harga serta ketersediaan pasokan bahan pangan pokok dan penting, termasuk gas LPG 3 kg bersubsidi, baik yang berada di pasar tradisional, pasar modern, maupun di tingkat agen dan distributor, agar stabilitas harga tetap terjaga dan distribusi yang merata.
10. Meningkatkan frekuensi inspeksi mendadak (sidak) ke gudang-gudang distributor guna mencegah praktik penimbunan atau spekulasi harga
11. Updating secara berkala dan tetap waktu tentang laporan harian perkembangan harga barang kebutuhan pokok oleh Dinas Perdagangan Provinsi dan Kabupaten/Kota.
12. Penguatan terhadap mitigasi perubahan/anomali cuaca pada awal tahun, pertengahan tahun dan akhir tahun. Perubahan kondisi cuaca ekstrem berupa tingginya curah hujan maupun potensi kekeringan/kebakaran lahan akibat musim panas harus diantisipasi dengan segera karena berdampak pada distribusi barang maupun perubahan musim tanam bagi pertanian. Untuk itu Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Selatan harus proaktif memberikan pendampingan dan penyuluhan ke

petani agar dapat mengantisipasi musim tanam, dan Dinas Perhubungan dapat berkoordinasi dengan pihak pengelola pelabuhan bongkar muat serta BMKG Kalimantan Selatan terhadap potensi gangguan distribusi.

13. Seiring penambahan operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kalimantan Selatan diharapkan meningkatkan kerjasama dengan Bulog Kalimantan Selatan untuk menjamin pasokan kebutuhan beras premium bagi program MGB.
14. Dalam rangka mendukung program optimalisasi lahan dan cetak sawah, serta mempercepat peningkatan produksi hasil pertanian dan kesejahteraan petani di daerah, maka bantuan pertanian melalui dana APBD Provinsi perlu terus dilaksanakan dan ditingkatkan.
15. Peningkatan pengetahuan dan pemahaman mengenai pengendalian inflasi dengan cara meningkatkan pelaksanaan capacity building kepada anggota TPID Provinsi dan Kabupaten/Kota.
16. Pembuatan Pelaporan Evaluasi Kinerja TPID Tahun 2025 dapat dilaksanakan mulai bulan Januari 2026 untuk seluruh TPID Provinsi dan TPID Kabupaten/Kota.
17. Melakukan monitoring dan evaluasi secara rutin terhadap Pengendalian Inflasi di Kabupaten/Kota.